Pertarungan Ideologi Kurikulum dan Kerentanan Pendidikan Indonesia

(*Pernah disampaikan pada diskusi Lingkar Studi USD*)

Fx. Duda Teda Ena, M.Pd., Ed.D.

Kalau kita sebagai guru atau dosen ditanya: "Apa ideologi pendidikan Anda?" mungkin kita akan terkejut atau tidak bisa menjawab atau kita akan menjawab sekenanya.

Tak jarang pendidikan kita anggap sebagai sesuatu yang netral dan apolitis. Pada kenyataannya pendidikan selalu sarat nilai, politis, dan bahkan sarat kepentingan. Namun demikian jarang sekali yang menyadarinya atau kebanyakan pelakupendidikan menghindarinya. Bahkan ketika ada yang menyampaikan hal ini tak jarang orang akan menolak dengan dalih bahwa pendidikan bertujuan mulia sehingga bebas dari berbagai kepentingan. Bahkan kesadaran akan saratnya kepentingan dalam dunia pendidikan ini tidak terjadi di FKIP di berbagai universitas. Ketika saya mengamati dokumen kurikulum mereka, saya tidak menemukan adanya mata kuliah 'politik pendidikan' atau setidaknya mata kuliah yang mungkin menyelipkan topik ini.

Tulisan ini akan memaparkan berbagai jenis ideology pendidikan beserta manifestasinya serta membahasa kerentanan yang ditimbulkannya. Kurikulum biasanya akan menjadi medan pertempuran berbagai pihak yang mempunyai ideology berbeda. Diskusi singkat ini semoga menyadarkan posisi kita sehingga kita tidak hanya menjadi penonton atau bahkan menjadi korban pertempuran ideology pendidikan.

Ideologi Pendidikan

Pendidikan adalah tindakan terorganisir yang paling ideologis. Namun sebelum berdiskusi lebih jauh, marilah kita samakan dahulu pemahaman tentang kata 'ideologi' itu sendiri.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ideologi adalah: kumpulan konsep bersistem yg dijadikan asas pendapat (kejadian) yg memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Menurut O'Neill (1990) ideologi pendidikan berakar pada ideologi politik. Dalam KBBI ideologi politik (pendidikan) dijelaskan sebagai sistem kepercayaan yg menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik (pendidikan) yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk mencapainya.

Konon, Napolean Bonaparte-lah yang dipercaya sebagai penemu kata 'ideologue' untuk mendeskripsikan orang-orang yang mengkritik penguasa atau pemerintah secara berlebihan (Eagleton, 1991; Williams, 1994 dalam Leonardo, 2003). Dalam perkembangan selanjutnya Karl Marx menjelaskan ideology sebagai kesadaran palsu. Menurutnya kesadaran akan membentuk kehidupan social dan ideology adalah sebuah distorsi dari sebuah realitas yang objektif (Leonardo, 2003).

Leonardo (2003) dalam bukunya yang mengulas ideology pendidikan menjelaskan bahwa ideology mempunyai tiga demensi. Ideologi adalah sesuatu yang dibutuhkan yang bisa bersifat negative sebagaimana diungkapkan oleh Marx, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang positif ketika ideology tersebut bisa dipakai untuk meluruskan kesadaran palsu yang diciptakan penguasa. Para penganut Marx melihat pendidikan adalah proses pelangengan struktur masyarakat yang tidak berkeadilan, sekolah hanyalah sebagai institusi yang mereproduksi ketimpangan social. Namun bagi para penganut 'pedagogy of hope' pendidikan masih menyisakan harapan, sekolah adalah tempat untuk meluruskan kesadaran yang palsu, ideology diperlukan untuk mengorganisir kerangka piker bagi sebuah objektifitas (McLaren, 1998 dalam Leonardo, 2003).

Ketika kita menganalisa sebuah ideology kita harus berpijak pada asumsi bahwa pokok permasalahan ideologi adalah masalah hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang ditanamkan melalui Bahasa. Bahasa dalam hal ini adalah semua bentuk wacana Bahasa, bukan saja Bahasa verbal tetapi juga Bahasa visual dan Bahasa simbol. Dengan demikian untuk memahami ideology pendidikan kita perlu menelaah Bahasa yang dipakai pada ranah pendidikan. Pelaku pendidikan, guru dan murid perlu mempelajari dan membongkar lagi atau mengabaikan apa yang sudah dipelajari untuk bisa melihat dengan gamblang sebuah ideology pendidikan.

Bahasa adalah alat yang dipakai untuk menghadirkan (atau menyembunyikan) sebuah ideology. Tak jarang Bahasa resmi yang kita jumpai dalam ranah pendidikan hamper selalu tak-politis dan terlepas dari kesejarahan (Apple, 1979 dalam Weis, McCarthy, & Dimitriadis, 2006). Kita tentu sangat paham dengan kondisi ini. Pemerintah selalu menanamkan ide (dengan Bahasa resmi) bahwa pendidikan adalah sesuatu yang murni dan bebas dari kepentingan politik. Tetapi kita juga

dengan gamblang bisa melihat ketika menteri pendidikan berasal dari partai tertentu sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan partai itu mendapat bantuan yang melimpah ruah.

Pertarungan Berbagai Ideologi Pendidikan

Ideologi adalah sebuah alat untuk melanggengkan kekuasaan yang selalu disamarkan maka perebutan kekuasaan khususnya dalam ranah pendidikan juga menjadi sangat samar. Tidak ada yang pernah bisa membuktikan secara empiris hubungan antara kebijakan atau tindakan dengan ideology. Di bawah ini saya meminjam penggolongan ideology pendidikannya O'Neill (1990) karena dia bisa menghubungan ideology pendidikan dengan tindakan atau kebijakan secara nyata.

Ideologi Pendidikan menurut O'Neill (1990)

Ideologi pendidikan digolongkan menjadi enam golongan yang sebenarnya berasal dari dua golongan besar. O'Neill (1990) membagi ideology menjadi dua golongan besar yaitu konservatif dan liberal. Golongan konservatif meliputi tiga sub-golongan yaitu fundamental, intelektual, dan konservatif. Sedangkan golongan liberah dibagi lagi menjadi liberal, leberasi, dan anarki. Ideologi pendidikan mempunyai pengaruh langsung yang besar pada seseorang terkait dengan tujuan pendidikan, tujuan sekolah, pandangan terhadap pembelajar, tata kelola, sifat kurikulum, model pembelajaran, evaluasi, dan pengelolaan kelas.

Berikut ini ringkasan saya atas ideology pendidikan menurut O'Neill:

Ideologi pendidikan yang pertama adalah fundamentalisme. Dalam ideology pendidikan fundamental, pendidikan adalah alat untuk merekonstruksi tatanan masyarakat untuk mencapai tatanan moral yang sudah ditakdirkan. Pendekatan ini anti intelektual dan tidak ada ruang untuk mengkritisi bentuk tindakan dan iman yang sudah ditakdirkan dari atas. Pendidikan dipandang sebagai tindakan regenerasi dan pengkoreksian moral yang tidak sesuai dengan keberadaan tradisi dan institusi.

Ideologi pendidikan yang kedua menurut O'Neill adalah intelektualisme. Dalam kerangka pikir ini ilmu pengetahuan dipandang sebagai sebuah keparipurnaan dan kebenaran mempunyai nilai intrinsic sendiri. Pendidikan adalah sebuah orientasi terhadap kehidupan pada umumnya. Fokusnya ada pada sejarah intelektualitas manusia yang didominasi oleh tradisi intelektualitas barat klasik.

Ideologi yang keempat adalah ideology pendidikan konservatif di mana pengetahuan dipandang sebagai alat dan sarana social untuk mewujudkan nilai-nilai social yang sudah ada. Manusia dipandang sebagai warga dari sebuah tatanan social yang sudah mapan. Pendidikan dipandang sebagai sebuah sosialisasi atau pengenalan pada tatanan social yang sudah mapan tersebut. Sedangkan ideology yang berikutnya adalah liberalism. Dalam ideology ini ilmu pengetahuan dipandang sebagai alat untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Setiap orang dipandang sebagai pribadi yang unik yang selalu menemukan kepuasan ketika bisa mengekpresikan dirinya sebagai tanggapan akan berbagai perubahan. Pendidikan

dipandang sebagai sebuah perkembangan diri yang efektif.

Ideologi pendidikan yang kelima adalah liberasionisme. Ilmu pengetahuan adalah sebuah alat yang diperlukan untuk melakukan reformasi social. Manusia adalah sebuah produk kebudayaan yang menemukan kepenuhan dirinya di dalam dan mengikuti atau dikontrol oleh tatanan social yang ada. Pendidikan adalah pengembangan secara penuh potensi dari setiap individu yang unik dan berbeda dari individu yang lain. Tujuan pendidikan adalah pemerdekaan setiap individu yang kepenuhan perkembangannya sebagai manusia terkadang dihalangi oleh tatanan social yang ada.

Ideologi pendidikan yang terakhir menurut O'Neill adalah anarkisme. Dalam anarkisme pengetahuan dipandang sebagai produk sampingan dari hidup saja. Pendidikan dipandang sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan sebenarnya terjadi dengan sendirinya di masyarakat. Maka dari itu menurut ideology ini sekolah formal bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan bila perlu. Penghilangan institusi ini diharapkan akan menghilangkan kekangan-kekangan terhadap perkembangan individu.

Kurikulum sebagai Medan Tempur

Dalam dunia pendidikan, ideology-ideologi di atas mewujud dalam kurikulum sekolah. Kurikulum setidaknya bisa kita pahami sebagai tiga hal. Pertama, kurikulum sebagai sebuah dokumen. Inilah pemahaman umum tentang kurikulum. Ketika kita menyebut kata kurikulum maka yang terlintas dalam pikiran adalah segepok dokumen yang memuat rambu-rambu dan segala hal yang terkait dengan pembelajaran. Kurikulum dalam arti yang pertama inilah yang paling mudah kita telaah sehingga ideologinyapun akan menjadi paling mudah dikenali. Misalnya kalau kita membaca dokumen kurikulum 2013 dan kemudian mencocokannya dengan kriteria yang dibuat oleh O'Neill (1990) di atas, kita akan segara bisa menyimpulkan ideologinya.

Kurikulum dalam arti yang kedua adalah apa saja yang terjadi dalam praktek pendidikan (enacted curriculum). Apa yang terjadi di dalam praktek keseharian pendidikan lebih sulit ditelaah. Praktek keseharian tidak hanya melibatkan Bahasa verbal melainkan juga Bahasa visual. Seperti kita bahas diawal bahwa ideology mewujud melalui Bahasa, maka kurikulum sebagai praktek keseharian menggunakan Bahasa yang kompleks sehingga sulit untuk disimpulkan ideology apa yang sedang mewujud.

Ketiga, kurikulum juga bisa berarti sesuatu yang tersamar (hidden curriculum). Ideologi kurikulum tersembunyi adalah yang paling sulit dideteksi tapi menurut berbagai penelitian adalah yang paling berpengaruh terhadap perkembangan ideology anak didik. Kurikulum tersembunyi biasanya hanya muncul dipermukaan dalam bentuk Bahasa symbol sehingga penerjemahan langsung bisa meleset atau bahkan salah.

Ketiga tingkat perwujudan kurikulum inilah yang menjadi arena perebutan berbagai pihak untuk menanamkan ideology tertentu pada anak didik.



Sumber: www.tomorrowsyouth.org

Rezim Standar vs Rezim Deregulasi

Perebutan arena pendidikan yang sangat kentara terjadi di Indonesia saat ini adalah perbutan antara rezim standar melawan rezim deregulasi. Tetapi semenjak kurikulum 2006 dihentikan maka tampak jelas pemenangnya adalah rezim standar. Semua bidang kehidupan dalam pendidikan telah distandarisasi. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan standar adalah buruk dan tidak bermutu.

Pertentangan ini tidak hanya di Indonesia saja. Di Amerika Serikat yang berada pada kubu rezim standar adalah para ahli kebijakan pasar, kelompok bisnis, kelompok agama, pemikir konservatif, dan kelompok yang melihat pendidikan dalam masalah besar. Menurut kelompok ini pendidikan bersifat birokratis, tidak akuntabel, dan hasilnya kurang bagus. Maka reformasi berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja adalah solusi yang sangat tepat (Smith, 2003).

Para pemikir pendidikan biasanya berada pada kubu deregulasi. Standarisasi dipandang sebagai sesuatu yang perlu tetapi bukan merupakan solusi dan kadang malah menjerumuskan. Guru dan siswa hendaknya diberi ruang dan keleluasaan untuk berkembang sesuai jadi diri mereka sehingga akan tercipta masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan (Smith, 2003).

Standarisasi berasal dari rasionalitas teknis yang telah membawa perkembangan luar biasa di berbagai bidang. Kekeliruannya adalah bahwa rasionalitas ini lalu dismaratakan dan diterapkan di berbagai bidang yang tidak relevan seperti pendidikan, agama, dan seni. Orang lupa bahwa rasionalitas teknis yang bersifat hubungan positifistik sebab akibat hanya akan efektif apabila diterapkan pada fenomena non-manusia (Fay, 1975 dalam Tuinamuana, 2011).

Keunggulan dan Kerentanan Indonesia

Indonesia adalah bangsa yang terpelik secara demografi. Indonesia menempati urutan keempat dalam hal populasi dan mempunyai jumlah etnis dan Bahasa terbanyak di dunia. Hal ini adalah sebuah keunggulan namun pada saat yang sama adalah sebuah kerentanan. Jumlah penduduk dan perbedaan yang ada bisa menjadi modal utama untuk menjadi bangsa yang besar, namun tidak mustahil juga apabila perbedaan-perbedaan yang ada tidak dihidupi sebagai rahmat akan terjadi perpecahan dan kehancuran. Contohnya yang gagal menghidupi rahmat perbedaan adalah Uni Soviet dan juga beberapa Negara di Timur Tengah.

Berbagai unsur yang berbeda di Indonesia misalnya etnik dan agama belum bisa seperti yang dicita-citakan yaitu bhineka tunggal ika. Bhineka tunggal ika adalah keadaan ideal sebuah proeksistensi. Kondisi Indonesia saat ini baru pada tahap koeksistensi. Perbedaan yang ada baru 'berada' bersama, itupun belum mengendap, masih ada konflik-konflik yang muncul. Proeksitensi adalah 'mengada' bersama, keberadaan yang satu memperkaya keberadaan yang lain. Mengada bersama bisa jadi hanya sebuah utopia karena tidak pernah tercapai. Barangkali di sinilah peran pendidikan, menjaga dan memelihara asa supaya 'mengada bersama' ini tida padam.

Kalau pendidikan kita gagal barangkali kita akan menuju sebuah dystopia. Koeksistensi atau 'berada bersama' yang saat ini terjadi justru akan menuju pada segregasi.

Tradisi 'mengada bersama' ini di Indonesia bisa kita lihat misalnya pada tradisi kegiatan gotong royong, kenduri, dan kegiatan lain sejenis. Masyarakat dari agama dan suku yang berbeda mempunyai kesempatan untuk berinteraksi secara tulus demi tujuan bersama. Namun tradisi-tradisi ini mulai berkurang bahkan hilang.

Tradisi segregasipun di Indonesia sudah lama ada dan nampaknya masih terpelihari dan bahkan sekarang menjadi lebih mengkhawatirkan. Tradisi yang terpelihara bisa kita lihat di makam-makam yang terpisah di kota-kota. Kita juga bisa melihat kegagalan Indonesia untuk menyatukan sistem pendidikan nasional sehingga ada sekolah di bawah departemen agama dan di bawah departemen pendidikan. Tak jarang kita melihat asrama dan bahkan rumah kos yang melakukan segregasi berdasar agama. Pelajaran agama di sekolah negripun masih bersifat segregatif, tidak ada studi komparasi yang memungkinkan sebuah proeksistensi. Demikan pula UU perkawinan tahun 1974 tidak memungkinkan adanya 'mengada bersama'. Bahan ajar di sekolahpun diskriminatif dan tidak berkeadilan (Ena, 2012; 2013)

Apabila pendidikan Indonesia berhasil satu ideology yang mendorong masyarakat yang baru koeksis menuju masyarakat yang proeksis maka perbedaan adalah sebuah keunggulan. Sebaliknya apabila gagal, koeksistensi yang ada akan mengarah pada segregasi dan menuju pada disintegrasi.

Penutup

Sesudah memahami berbagai aliran ideology pendidikan serta berbagai bentuk manifestasinya, dan juga memahami berbagai kerentanan yang ditimbulkannya, semoga kita bisa memahami pendidikan Indonesia dengan lebih baik. Apakah kita sedang menuju ke Indonesia yang Utopis? Para gembala tidak khawatir karena anak singa dan anak lembu merumput bersama? Ataukah kita sedang menuju ke Indonesia yang distopis di mana pertumpahan darah, tangis, dan kertak gigi terdengar siang dan malam?

Saya kira bukan dua-duannya. Indonesia bukan sebuah utopia, bukan sebuah cita-cita luhur, apalagi sebuah imaginasi, namun Indonesia juga bukan sebuah dystopia. Indonesia adalah sebuah realitas. Maka pendidikan kita harus mampu menghidupi dua tegangan ini dengan penyadaran akan adanya kerentanan secara terus menerus.

Referensi

BPS Strategic Data: Statistics Indonesia (2010). Jakarta: BPS-Statistic Indonesia.

Campbell, D.E. (2010). *Choosing democracy: a practical guide to multicultural education.* Boston: Allyn & Bacon.

Cochran-Smith, M. and Mary Kim Fries. (2001). Sticks, Stones, and Ideology:The Discourse of Reform in Teacher Education. Educational Researcher, Vol. 30. No. 8, pp. 3–15

Davies, S. G. (2010). *Gender diversity in Indonesia: sexuality, Islam, and queer selves*. Hoboken: Routledge.

Ena, Ouda T. (2012) *Visual analysis of e-textbooks for senior high school in Indonesia*. An unpublished dissertation. Chicago: Loyola University of Chicago.

Ena, Ouda T. (2013) *Content analysis: Visual analysis of e-textbooks for senior high school in Indonesia*. Charleston: Createspace.

Haryatmoko. (2010). *Dominasi penuh muslihat: Akar kekerasan dan diskriminasi (Domination full of conspiracy: The root of violence and discriminations).* Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus versi online/daring (dalam jaringan) http://kbbi.web.id/ideologi.

Leonardo, Z. (2003). Ideology, discourse, and school reform. Westport: Praeger Publishers.

O'Neill, W. F. (1990). Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophy. Dubuque,Iowa: Kendall / Hunt Publishing Company (first published in 1981).

Ramstedt, M & Fadjar Ibnu Thufail (Ed.). (2011). Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada masa pasca-orde baru. Jakarta:

Grasindo.
Ramstedt, M. (2011). Menafsir kembali tata norma Bali pasca-orde baru: reformasi Negara dan kegalauan makna ke-Bali-an. Dalam Ramstedt, M & Fadjar Ibnu Thufail (Ed.). Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada masa pasca-orde baru. Jakarta: Grasindo.
Smith Kevin B. (2003). The ideology of education : the commonwealth, the market, and America's schools. Albany: NUP.
Tuinamuana, K. (2011). Teacher Professional Standards, Accountability and Ideology: Alternative Discourses. Australian Journal of Teacher Education. Vol 36, 12, December 2011 72
Warta, C. (2011). Perkembangan masalah agama di Papua: Sengketa antara agama dan pencegahan konflik. Dalam Ramstedt, M & Fadjar Ibnu Thufail (Ed.). Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada masa pasca-orde baru. Jakarta: Grasindo.
Weis, L., Cameron McCarthy, and Greg Dimitriadis. (2006). Ideology, curriculum, and the new sociology of education : revisiting the work of Michael Apple. New York: Routledge.
Zamudio, M. M.. (2011). Critical race theory matters : education and ideology. New York: Routledge.